

# Mendorong **Kebijakan Program Sekolah Rakyat** Inklusif, Terintegrasi dan Transformatif

Diskusi, “Membedah Sekolah Rakyat: Memicu Kesenjangan atau Kesetaraan?”

**Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)**

Selasa, 29 April 2025

Dyah Larasati, M.Sc. in Child Development  
Research Fellow/Social Policy Expert  
RDI/Resilience Development Initiative

# Situasi Pendidikan dan Kemiskinan 2024

---

- Pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan → disparitas akses di daerah terpencil, infrastruktur yang kurang memadai, distribusi dan kualitas guru serta rendahnya angka partisipasi di tingkat menengah atas dan pendidikan tinggi termasuk:
  - ❖ Ketimpangan capaian APS antarkelompok umur semakin lebar seiring dengan kenaikan kelompok umur
  - ❖ **Pada jenjang pendidikan menengah, capaian APM yang rendah terlihat pada laki-laki, mereka yang tinggal di perdesaan, dan kelompok pengeluaran terbawah.**
- Tingkat penyelesaian Pendidikan:
  - ❖ Jenjang SD sederajat: 97,84 persen
  - ❖ Jenjang SMP sederajat: 91,15 persen
  - ❖ **Jenjang SMA/SMK sederajat: 67,07 persen.**
- Pencapaian Wajib Belajar 9 Tahun, Ketimpangan Pendidikan dan Lama Sekolah:
  - ❖ **Sekitar 63,84 persen penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas yang telah mencapai wajib belajar 9 tahun.**
  - ❖ Masih terdapat ketimpangan tingkat pendidikan yang ditamatkan dari penduduk usia 15 tahun ke atas untuk penduduk yang tinggal di perdesaan, kondisi ekonomi rumah tangga yang rendah serta para penyandang disabilitas.
  - ❖ **Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2024 mencapai 9,22 tahun atau setara kelas 9 SMP sederajat.**
- **Tingkat Kemiskinan pada 2024** (September) adalah sebesar **8.57 persen** (24,06 juta orang) dan **Tingkat Kemiskinan Ekstrem sebesar 0.83 persen.**
- **Garis Kemiskinan (GK)** pada September 2024 tercatat sebesar **Rp595.242,00/kapita/ bulan** dengan komposisi GK Makanan sebesar **Rp443.433,00** (74,50 persen) dan GK Bukan Makanan sebesar **Rp151.809,00** (25,50 persen).
- **BPS menggolongkan penduduk miskin ekstrem adalah ketika pengeluaran per kapita di bawah Rp10.739 per hari atau hanya Rp322.170 per bulan.** Untuk keluarga beranggota empat orang, batas ini adalah **Rp1.288.680 per bulan.**

# Upaya Mengatasi Tantangan Pendidikan dan Kemiskinan

---

Pemerintah telah melakukan berbagai Upaya untuk mengatasi Tantangan Pendidikan seperti:

1. **Implementasi Kurikulum Merdeka** (dirancang untuk meningkatkan fleksibilitas pembelajaran dan pengembangan kompetensi siswa);
2. **Program-program strategis seperti Dana Alokasi Khusus (DAK)** untuk perbaikan fasilitas Pendidikan;
3. **Program Indonesia Pintar (PIP)** untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu; **dan**
4. **Platform pembelajaran digital (belajar.id)** turut mendukung peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan.

Sumber: Statistik Pendidikan BPS 2024; BPS 2024.

Untuk mengurangi Kemiskinan termasuk Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah juga telah mengalokasi anggaran untuk melaksanakan berbagai program termasuk:

1. **Pengurangan Beban Pengeluaran**, melalui berbagai program bantuan sosial non-kontribusi seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Program JKN-PBI.
2. **Peningkatan Pendapatan Masyarakat**, melalui program-program pemberdayaan masyarakat dan UMKM seperti pemberian sarpras UMKM, Dana Desa, Padat Karya, kelompok usaha bersama (KUBE), Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan ternak dan ikan, pelatihan kewirausahaan, dll.
3. **Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan** melalui peningkatan akses layanan dasar dan konektivitas antar wilayah seperti pembangunan sekolah, puskesmas/pustu, jalan, dll.

Sumber: TNP2K, 2023

# Faktor Risiko Anak Usia Sekolah berdasarkan Siklus Hidup



## Jenjang SD/MI Usia 6-12 Tahun

- Malnutrisi & kesehatan buruk (akibat kemiskinan atau akses terbatas ke makanan bergizi)
- Keterbatasan pemahaman literasi dan numerasi
- Kekerasan/pelecehan di rumah atau sekolah
- Pengabaian orang tua atau rendahnya keterlibatan orang tua dalam pembelajaran
- Pekerja anak atau pekerjaan rumah tangga yang mengganggu sekolah
- Kurangnya pendidikan inklusif untuk anak-anak perempuan dan penyandang disabilitas



## Jenjang SMP/MTs Usia 13-15 Tahun

- Putus sekolah, terutama pada anak dari keluarga berpenghasilan rendah
- Pernikahan dini (terutama anak perempuan di daerah pedesaan/berpenghasilan rendah)
- Penindasan atau tekanan teman sebaya yang menyebabkan masalah perilaku
- Masalah kesehatan mental (stres, kecemasan, masalah identitas)
- Paparan perilaku berisiko (misalnya, merokok, narkoba, eksploitasi daring)
- Kekerasan berbasis gender di dalam atau di sekitar lingkungan sekolah



## Jenjang SMA/MA Usia 15-17 Tahun

- Tekanan ekonomi untuk bekerja atau menafkahi keluarga alih-alih menyelesaikan sekolah
- Kurangnya akses ke pelatihan vokasi yang bermutu
- Keterampilan yang tidak sesuai dengan tuntutan pasar kerja
- Akses yang rendah ke bimbingan karier
- Kesenjangan digital membatasi akses ke pembelajaran atau peluang
- Kehamilan remaja atau pernikahan paksa



## Jenjang Perguruan Tinggi Usia 18-21 Tahun

- Biaya pendidikan dan biaya hidup yang tinggi
- Beban utang pinjaman mahasiswa atau kurangnya beasiswa
- Stres akademis dan masalah kesehatan mental
- Pengangguran atau pengangguran pasca-kelulusan
- Keterbatasan keterampilan lunak/kesempatan magang
- Pengucilan terhadap pemuda yang terpinggirkan (misalnya, penyandang disabilitas, penduduk asli)

# Sekilas Tentang Program Sekolah Rakyat (1)

---



## Dasar Hukum:

- **Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20/2003**, yang menjamin hak atas pendidikan melalui jalur formal dan nonformal.
- **Instruksi Presiden/Inpres No.8 tahun 2025** tentang **Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (OPPKPKE)** (Tanggal: 27 Maret 2025).



## Tentang:

- **Program Sekolah Rakyat** merupakan sekolah gratis yang akan menyediakan pendidikan gratis berkualitas untuk jenjang **Pendidikan SD, SMP, dan SMA** dengan standar **Pendidikan Nasional** (mata pelajaran formal dan kurikulum dengan penekanan karakter, kepemimpinan, nasionalisme dan keterampilan) **bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.**
- **Program Sekolah Rakyat** merupakan kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
- **Program Sekolah Rakyat** akan memenuhi seluruh kebutuhan siswa dalam pelaksanaannya mulai dari seragam, makanan, dan ketersediaan asrama untuk tempat tinggal siswa.
- **Sekolah Rakyat** memanfaatkan pendekatan berbasis asrama, kurikulum fleksibel (*multi entry dan exit*), dan model pemberdayaan berbasis komunitas → Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus dalam memberi pendidikan, tetapi juga melatih keterampilan kerja dan kemandirian ekonomi.

Sumber: <https://kemensos.go.id/berita-terkini/menteri-sosial/Kemensos-Matangkan-Konsep-Sekolah-Rakyat,-Siap-Diluncurkan-Juli-2025>; Sekretariat Kabinet RI, 2025

# Sekilas Tentang Program Sekolah Rakyat (2)

---



## Akses Sekolah Rakyat:

- **Sebanyak 198 lokasi telah diusulkan menjadi tempat pendirian Sekolah Rakyat. Dari jumlah tersebut, 45 lokasi telah siap beroperasi tahun ini.** Usulan berasal dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pihak swasta yang bersedia menyediakan lahan serta bangunan.
- **Sekolah Rakyat ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran (TA) 2025/2026 (Juli 2025)** → Proses penerimaan peserta didik dan rekrutmen tenaga pendidik akan dimulai pada April 2025.



- **Target Peserta Didik:** Pemerintah menargetkan peserta didik berasal dari keluarga pada kategori desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
- **Mekanisme Seleksi:** Peserta didik akan diseleksi secara bertahap melalui berbagai tahapan: *i*) seleksi administratif, anak-anak yang berhak mendaftar adalah mereka yang termasuk dalam Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN); *ii*) calon siswa akan menjalani tes potensi akademik, psikotes, kunjungan rumah (*home visit*), wawancara dengan orang tua, serta pemeriksaan kesehatan.



## Seleksi Tenaga Pendidik:

- **Tenaga pendidik akan direkrut dari 60.000 guru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG).** Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah memetakan persebaran guru agar mereka dapat ditempatkan sesuai dengan lokasi Sekolah Rakyat di daerah asalnya.
- **Pemerintah juga membuka opsi penugasan guru ASN di Sekolah Rakyat.** Para calon guru juga akan mengikuti seleksi untuk mengukur kompetensi dan kesiapan mereka

# Peran Kementerian dan Lembaga (K/L) pada Program Sekolah Rakyat (1)

No.	Kementerian/Lembaga (K/L)	Penugasan pada Program Sekolah Rakyat
1.	Kementerian Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat (KemenkoPM)	Melakukan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian program kementerian/lembaga dalam upaya menurunkan beban pengeluaran masyarakat dan mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan, termasuk program sekolah rakyat.
2.	Kementerian Sosial (Kemensos)	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Membentuk dan menyelenggarakan sekolah rakyat berasrama bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem;</li><li>▪ Menyiapkan dan menyusun kurikulum sekolah rakyat berasrama yang berlandaskan pada sekolah formal dan sekolah karakter;</li><li>▪ Menyiapkan sarana prasarana dan sekolah rakyat.</li></ul>
3.	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Agama (Kemenag)	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Menyiapkan dan menyusun kurikulum sekolah rakyat berasrama yang berlandaskan pada sekolah formal</li><li>▪ Menyediakan guru, tenaga pendidik, dan siswa untuk program sekolah rakyat.</li></ul>
4.	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek)	Mendorong peran perguruan tinggi untuk melakukan pendampingan optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk program sekolah rakyat, melalui tri dharma perguruan tinggi.
5.	Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU)	Mendukung program sekolah rakyat untuk masyarakat miskin dan miskin ekstrem melalui penyiapan sarana dan prasarana strategis.
6.	Kementerian Keuangan (Kemenkeu)	Menyiapkan alokasi anggaran dan sinergi pendanaan dalam optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk program sekolah rakyat, sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB)	Menviapkan formasi jabatan guru dan tenaga pendidik serta kelembagaan dalam program sekolah rakyat.

# Peran Kementerian dan Lembaga (K/L) pada Program Sekolah Rakyat (2)

No.	Kementerian/Lembaga (K/L)	Penugasan pada Program Sekolah Rakyat
8.	Kantor Staf Presiden (KSP)	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Melakukan penyelesaian masalah secara komprehensif (<i>bottlenecking</i>) dalam program optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk program sekolah rakyat.</li><li>▪ Melakukan pengawalan program optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk program sekolah rakyat.</li></ul>
9.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Melakukan pendampingan dan pengawasan akuntabilitas dalam kegiatan optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk program sekolah rakyat; dan</li><li>▪ Mengoordinasikan dan sinergi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam membantu optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk program sekolah rakyat.</li></ul>
10.	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	Menyiapkan rekrutmen guru dan tenaga pendidik program sekolah rakyat.
11.	Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP-Taskin)	Memastikan program sekolah rakyat tercantum dalam rencana induk percepatan pengentasan kemiskinan.
12.	Lembaga Administrasi Negara (LAN)	Melakukan penyiapan konsep dan kelembagaan pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk program sekolah rakyat.
13.	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Memberikan dukungan pendampingan sumber daya manusia dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk program sekolah rakyat;</li><li>▪ Memberikan dukungan dalam penyiapan dan pemanfaatan sarana dan prasarana termasuk lahan sesuai kondisi dan kebutuhan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk program sekolah rakyat.</li></ul>

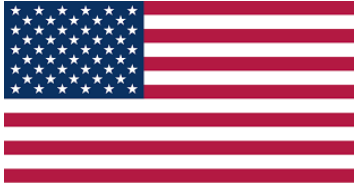


## Peran Kementerian dan Lembaga (K/L) pada Program Sekolah Rakyat (3)

No.	Kementerian/Lembaga (K/L)	Penugasan pada Program Sekolah Rakyat
14.	Kepolisian Negara Indonesia	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Mengambil langkah-langkah komprehensif yang bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat terkait dengan optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk program sekolah rakyat; dan</li><li>▪ Melakukan penegakan hukum terhadap segala bentuk penyimpangan dan/atau penyalahgunaan program optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk program sekolah rakyat.</li></ul>
15.	Gubernur	Mendukung program sekolah rakyat di wilayah provinsi berupa penyiapan lahan, perizinan, dan penyiapan guru serta tenaga pendidik dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem
16.	Bupati dan Walikota	Mendukung program sekolah rakyat di wilayah kabupaten/kota berupa penyiapan lahan, perizinan, dan penyiapan guru serta tenaga pendidik dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;

**Sumber:** Instruksi Presiden/Inpres No.8 tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (OPPKPKE)

# Pembelajaran Praktik Baik Sekolah Asrama di Beberapa Negara



## Amerika Serikat – SEED Schools

- **SEED Foundation (sering disebut juga SEED Schools)** adalah organisasi yang didirikan pada 1997 untuk memberikan kesempatan persiapan perguruan tinggi di sekolah asrama bagi siswa kurang mampu.
- Berlokasi di Washington, D.C., Maryland, dan Miami, **SEED Schools mengintegrasikan "program akademis yang ketat dengan program asrama yang mendukung, mengajarkan keterampilan hidup dan menyediakan lingkungan yang aman dan terjamin.** Para siswa tinggal di asrama kampus selama seminggu untuk memberikan siswa pengalaman tempat tinggal yang sama.
- **Dampak Positif :** Angka kelulusan dan pendaftaran kuliah lebih tinggi bagi kaum muda yang berisiko.

Sumber: <https://www.seedfoundation.com>



## India - Eklavya Model Residential Schools

- **Sekolah Asrama Model Eklavya (EMRS)** adalah skema Pemerintah India untuk sekolah asrama model, khususnya untuk Suku Etnis di seluruh India. Bentuk sekolah ini merupakan salah satu intervensi utama *Ministry of Tribal Affairs*, Pemerintah India dan diperkenalkan pada tahun 1997-98
- **Sekolah asrama Eklavya gratis untuk anak perempuan dan siswa suku tertentu dengan fokus pada pengembangan holistik – meliputi akademis, gizi, kebersihan, dukungan emosional, dan kegiatan ekstrakurikuler.** Banyak anak miskin, terutama anak perempuan, putus sekolah karena tugas rumah tangga, pernikahan dini, atau jarak. Sekolah Eklavya menyediakan ruang yang aman dan lingkungan belajar yang konsisten.
- **Dampak Positif:** mengintegrasikan keterampilan hidup, kepekaan gender, dan konseling.

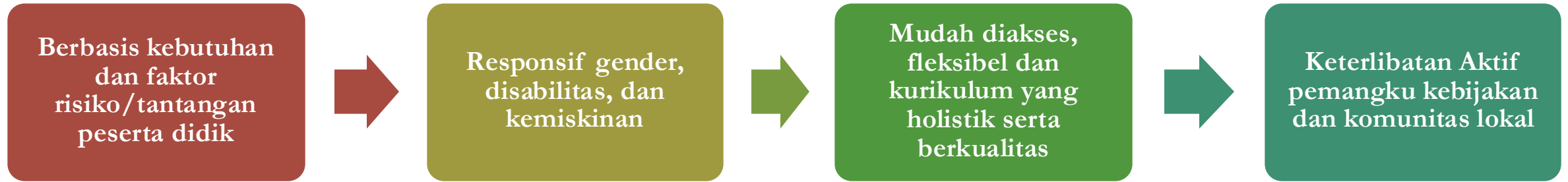
Sumber: <https://en.vikaspedia.in/viewcontent/social-welfare/scheduled-tribes-welfare/eklavya-model-residential-schools>

## Membedah Sekolah Rakyat: Mendorong Kebijakan Inklusif, Teintegrasi dan Transformatif

---

1. Bagaimana memastikan, dan strategi apa yang perlu diterapkan agar kebijakan **Sekolah Rakyat** dapat memenuhi kebutuhan peserta didik sasaran (kelompok miskin dan miskin ekstrem) dan menerapkan prinsip inklusi sosial (tidak memperlebar kesenjangan dalam pendidikan)?
2. Bagaimana cara agar kebijakan **Sekolah Rakyat** dapat memastikan peserta didik mendapatkan perlindungan sosial, kesempatan kerja yang layak, dan berhasil keluar dari kemiskinan (transformatif)?
3. Upaya-upaya apa yang perlu dilakukan pengambil kebijakan lintas sektoral untuk memastikan implikasi positif dari kebijakan **Sekolah Rakyat** (integrasi) dan memitigasi potensi melebarnya kesenjangan sosial dan segregasi pendidikan?

# Prinsip dan Rekomendasi agar Program Sekolah Rakyat Memenuhi Kebutuhan Peserta Didik secara Inklusif



- **Pemetaan kebutuhan peserta didik berbasis data mikro melalui beberapa tahapan:**
  1. **Assesmen tingkat capaian Pendidikan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota** (tingkat melanjutkan atau kelulusan Pendidikan yang masih rendah terutama pada jenjang Pendidikan menengah);
  2. **Mengembangkan indikator untuk mengidentifikasi calon peserta didik dari keluarga miskin yang memiliki tingkat risiko putus sekolah yang tinggi** (misalnya karena harus bekerja, sekolah jauh, tingkat, orang tua bekerja sebagai PMI, kondisi disabilitas, gender dll); berdasarkan DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional/Inpres 4 tahun 2025).
- **Pemetaan Wilayah Prioritas:** memastikan ketersediaan sarana Sekolah Rakyat pada wilayah-wilayah prioritas misalnya lokasi 3 T- Tertinggal, Terdepan dan Terluar.

Dilakukan pengembangan Modul pembelajaran holistik dan kontekstual yang relevan dengan kehidupan dan lingkungan peserta didik (contoh: pertanian, wirausaha mikro, keahlian praktis), termasuk:

- **Memastikan penerapan sistem pembelajaran inklusif:** metode aktif, jadwal fleksibel, bahasa daerah, dukungan psiko-sosial;
- **Integrasi prinsip GEDSI** (*Gender Equality, Disability, Social Inclusion*) dalam kurikulum dan kegiatan belajar mengajar.

Mendorong keterlibatan pemangku kebijakan lintas sektor → Misalnya melalui perekrutan fasilitator lokal atau diskusi secara regular dengan tokoh terkait yang memahami konteks sosial dan budaya setempat, untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.



# Strategi Transformatif untuk Menjamin Peserta dan/atau Lulusan Sekolah Rakyat Terlindungi dan “Naik Kelas Sosial”

Peserta Didik dan Lulusan Sekolah Rakyat harus memiliki akses komprehensif ke:

- i) Program perlindungan sosial (bantuan sosial, jaminan sosial dan akses ke mata pencaharian); dan
- ii) Informasi serta kesempatan kerja layak; agar bisa keluar dari kemiskinan struktural antar generasi.



# Strategi Integrasi Lintas Sektoral untuk Memperkuat Dampak Positif Sekolah Rakyat dan Mencegah Terjadinya Segregasi Pendidikan

## Potensi Risiko:

- Sekolah Rakyat jadi jalur “kelas dua”
- Potensi segregasi berdasarkan status sosial
- Ketimpangan kualitas antar wilayah

## Usulan Strategi Kolaborasi Lintas Sektor:

1. **Integrasi dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) dan Renstra Bidang Pendidikan** (dibawah Kemendikdasmen; Kemenag; Kemendiktisaintek)
2. **Gotong Royong konsolidasi anggaran dan sumber daya Pemerintah Pusat** (termasuk Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan); dan **Pemerintah Daerah**.
3. **Mendorong keterlibatan LSM, CSR, dan kampus** → dukungan untuk pelatihan guru, pemantauan dan evaluasi program Sekolah Rakyat.
4. **Membangun platform digital kolaboratif untuk memantau pelaksanaan SR** termasuk untuk memastikan kualitas dan sarana berbagi praktik baik antardaerah (data driven).
5. **Peningkatan kapasitas secara berkala bagi tenaga pendidik di Sekolah Rakyat dan atau fasilitator yang diperbantukan** untuk memberikan dukungan tambahan dalam kegiatan belajar mengajar.



# Penutup

## INKLUSIF, TRANSFORMATIF DAN KEBERLANJUTAN

- Kebijakan **Sekolah Rakyat** diharapkan tidak sekadar memberi akses atau bagian dari percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem.
- Penting untuk memastikan **keberlanjutan, keterjangkauan, transisi** peserta didik yang mudah pada pendidikan formal (Pendidikan Vokasi atau PT), **berkualitas** serta **jaminan masa depan yang lebih baik**

## KETAHANAN

- Sekolah Rakyat harus menjadi jembatan menuju mobilitas sosial dan membangun **ketahanan** dan masa depan dari peserta didik yang memiliki faktor risiko tinggi.
- Sekolah Rakyat bukan “ruang tunggu” dan segregasi **permanen** bagi anak-anak dari keluarga miskin

## KOMITMEN DAN KOLABORASI MULTI SEKTOR

- Dibutuhkan komitmen politik, anggaran, inovasi sosial, dan kolaborasi **multisektor** untuk menjadikan Program Sekolah Rakyat sebagai kebijakan yang terintegrasi dengan baik, inklusif dan transformatif.

## BERBASIS DATA

- Diperlukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan **komprensif** untuk memastikan **efektivitas** dari keberadaan **Sekolah Rakyat**; serta memastikan kualitas program berjalan berdasarkan data bukti yang kuat, rigours dan kredibel.

**Terima Kasih**